

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Terorisme adalah fenomena global yang riskan namun kerap sangat rumit untuk dideskripsikan dengan akurat, saking kompleksnya dinamika terorisme diperkuat dengan adanya seorang ahli yang menyampaikan bahwa pendefinisian tentang terorisme mencapai 180 perspektif (Putra, 2014).

Tidak sedikit orang berasumsi tentang terorisme tergolong ilmu baru karena mereka mengacu pada tragedi 9/11 WTC (World Trade Center) dimana pada bulan September 2001 lalu terjadi penyerangan Gedung *World Trade Center* dan Gedung Pentagon di *New York City*, kedua monumen itu adalah manifestasi power militer Amerika Serikat (Assakir, n.d.). Di sisi lain terdapat karya tulis yang menjabarkan tentang tema terorisme adalah ilmu yang sudah ada semenjak abad lalu, dinamika manusia dari dulu hingga saat ini kerap kali dihadapkan dengan situasi antara hidup dan mati dalam artian terror sebuah alat bagi mereka untuk bertahan atau menyerang.

Terorisme secara etimologi diambil dari bahasa latin yaitu *terrere* yang memiliki makna “menakut-nakuti”, secara terminologi terorisme sering di identikan dengan semacam kekerasan, ledakan, politik radikal, dan fundamentalis gerakan ini biasanya menargetkan masyarakat sipil tidak bersalah seperti bom bunuh diri di mall atau semacam tempat lainnya yang banyak orang berkumpul, ini serupa dengan kejadian penyerangan WTC (World Trade Center) dan Gedung Pentagon di *New York City* pada September 2001 lalu semenjak itu terorisme menjadi diksi berkonotasi negatif. (Handoko, 2019).

Menurut Alex P. Schmid seorang pakar terkemuka dalam studi terorisme yang mencoba mengelaborasi seratus lebih definisi tentang terorisme menjadi satu definisi yang tajam dan kuat Alex P.Schmid mengatakan terorisme adalah upaya kekerasan yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan untuk menebar rasa takut yang mendalam. Kegiatan ini biasanya dilakukan secara individu, kelompok, baik aktor negara secara sembunyi-sembunyi, dengan motif yang bisa saja politik, kejahatan kriminal, maupun

personal. Lain dengan tindak pembunuhan yang memfokuskan target korban secara langsung, pola terorisme justru menjadikan target korban sebagai sandera supaya menjadi alat komunikasi mereka kepada pihak ketiga, seperti sipil atau pemerintah. Target korban dipilih secara random atau bisa saja berdasarkan nilai target adalah orang penting. Metode penyanderaan ini dilakukan guna memberikan tekanan psikologis yang pada nantinya akan mempengaruhi langkah pihak yang dituju, dengan demikian terorisme dapat disederhanakan sebagai proses komunikasi yang menggunakan ancaman dan kekerasan sebagai alat utamanya (Schmidt, 2023).

Sebelumnya diksi terorisme memiliki konotasi yang positif pada abad 18 -19 karena terorisme adalah kegiatan yang digunakan untuk revolusi (Nursalim et al., 2014). Seperti peristiwa yang terjadi pada revolusi Prancis, terorisme digunakan pemerintah sebagai alat untuk melindungi revolusi, bahkan terorisme dianggap pahlawan karena menjaga kebebasan, keadilan dan republik dari musuh internal, namun kini terorisme memiliki konotasi yang sangat negatif bahkan sering diidentikan dengan pembunuhan, radikalisasi, dan pengeboman.

Kegiatan terorisme jika dilihat dalam konteks Filipina bukan hal yang baru. Filipina menghadapi isu terorisme dari semenjak tahun 1970an, akan tetapi rentang waktu tahun 2010 hingga tahun 2011, peristiwa terorisme di Filipina terhitung lumayan mengalami eskalasi masif diantaranya menjelang tahun 2010an terakumulasi bahwa terjadi kegiatan terkait terorisme mencapai 205 peristiwa, pada tahun 2011 terjadi kegiatan serupa sebanyak 149 peristiwa, 2012 tercatat 247 peristiwa, di tahun 2013 mengalami fluktuasi naik menjadi 651 peristiwa, tahun setelahnya 2014 lebih rendah dari tahun sebelumnya yaitu 597 peristiwa, kemudian di tahun 2015 mengalami fluktuasi yang sangat eskalatif hingga terjadi sebanyak 717 peristiwa, dan terakhir pada tahun setelahnya 2016 menurun menjadi 633 peristiwa terkait *terrorisme* (Wardani, 2018).

Filipina mengalami ancaman keamanan non-tradisional dimana resiko terorisme semakin masif, ini disebabkan dinamika terorisme di Asia Tenggara mengalami perubahan signifikan bersamaan dengan adanya aktor non-negara yang menggunakan ideologi jihad transnasional (Amin, 2018). Di Filipina, transformasi ini dimulai dengan kehadiran kelompok-kelompok separatis dan radikal semacam Kelompok Maute, penulis

akan mengarahkan lensa penelitian ini dengan Kelompok Maute sebagai objek penelitiannya. Kelompok Maute adalah kelompok yang berasal di Filipina Selatan tepatnya di Provinsi Lanao del Sur Filipina Selatan, seperti yang terlampir dalam gambar 1.

Gambar 1. Peta Lanao del Sur



Gambar 1 Sumber google maps: Peta Filipina, menunjukkan lokasi Provinsi Lanao del Sur dan Kota Marawi sebagai wilayah utama konflik dengan Kelompok Maute.

Mereka dikenal sebagai *Islamic State of Lanao*, kelompok ini didirikan sekitar tahun 2010-an kelompok ini memiliki kedekatan secara keluarga dengan Moro Islamic Liberation Front (MILF) dimana mereka diakui sebagai gerakan utama separatis di Filipina Selatan, Kelompok Maute didirikan oleh dua saudara Maute diantaranya Omarkhayam Romate Maute dan Abdullah Maute, diberitakan mereka dulunya sempat mengeyam pendidikan di Timur Tengah menurut penelitian mereka terpengaruh paham ekstremisme sejak itu, dan pada akhirnya membawa pengaruh itu ke tanah Filipina.

Kelompok Maute pada awalnya adalah gerakan separatis yang memperjuangkan hak-hak otonomi Muslim di Filipina Selatan. Akan tetapi merasa dikhianati dengan kebijakan pemerintah represif seperti darurat militer memarginalisasi terkesan cenderung mengancam penghapusan identitas Muslim di Filipina Selatan, langkah kebijakan yang

diambil pemerintah malah menjerumuskan Kelompok Maute mengadopsi ideologi jihad transnasional. gerakan ini memperjuangkan kendali otonomi bebas, khususnya di daerah Mindanao, namun tidak dapat dipungkiri ternyata Kelompok Maute berbai'at terhadap ISIS dengan lantang, ini sesuai dengan penelitian yang diteliti oleh Putu Agung Nara Indra Prima Satya dengan judul “Maute Group Dan Jaringan Keluarga Dalam Kelompok Islam Radikal Di Filipina Selatan”, Kelompok Maute berikrar *Baiat* (sumpah setia) kepada ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*) begitupun melakukan aksi-aksi yang persis dilakukan oleh ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*) diantaranya seperti ikon perjuangan salam tauhid (mengacungkan jari telunjuk ke atas) menggunakan bendera hitam khas ISIS, begitupun menggunakan setelan baju oranye kepada pekerja tambang yang mereka bunuh pada April 2016 (Agung et al., 2017)

Islam datang ke tanah Filipina pada abad ke 14 mereka masuk melalui perdagangan Arab, dan menetap di tanah Filipina bagian selatan sampai akhirnya mampu mendirikan Kesultanan solid yang diantaranya Kesultanan Sulu dan Maguindanao ditengah suku-suku lain masih kelompok kecil. Akan tetapi hegemoni kolonial Spanyol dan Amerika serikat di abad ke 19 membawa perubahan masif yang secara tidak langsung dapat memarginalisasikan komunitas Muslim di Filipina Selatan (Ratna Sari & Rafiqah, 2023).

Pada awalnya marginalisasi ini tidak begitu jelas namun melihat fakta adanya langkah kebijakan dari pemerintah untuk menempatkan penduduk kristen di Filipina Utara tepatnya daerah Luzon dan Visayas untuk menetap di Mindanao Filipina selatan dengan dalih pemerataan pembangunan karena Mindanao cenderung tertinggal daripada daerah lain di Filipina Utara, namun pada kenyataanya langkah kebijakan ini mengakibatkan kontestasi sumberdaya, kepemilikan lahan tanah, dan lapangan pekerjaan, ini sangat jelas merugikan penduduk Mindanao asli dan impliksinya menjadi terciptanya kesenjangan sosial antara Muslim sebagai penduduk asli Mindanao dan Kristen yang sebagai pindahan dari Luzon. Ini menggambarkan ketidakmampuan pemerintah dalam menciptakan keadilan pemerataan pembangunan yang mengakibatkan meningkatkan sara ketidakpercayaan structural Muslim terhadap pemerintah Filipina (Syahraeni, 2010).

Pada tahun 1946 Filipina berhasil merdeka dibawah hegemoni Amerika, proses integrasi Filipina dilakukan tanpa berunding dan meminta persetujuan dari pihak Muslim, hal ini mengakibatkan Filipina Selatan khususnya bangsa Muslim menolak karena mereka menposisikan bukan bagian dari kesatuan Filipina karena secara etnis dan suku mereka berbeda (Syahraeni, 2010). Bahkan tertuang dalam penelitian lain menjelaskan bahwa Muslim Filipina Selatan lebih memilih menetap dibawah naungan Amerika Serikat daripada intergrasi dengan Filipina yang mayoritas Kristen.

Hal ini mencerminkan penolakan secara identitas nasional sejak awal, dengan begitu melihat fakta bahwa komunitas Muslim secara terpaksa berintegrasi dengan Filipina melalui politik yang tidak terbuka menjadikan ketidakpercayaan mereka kepada pemerintah Filipina semakin besar, dan hal ini lah yang menjadikan dasar lahirnya kelompok Separatis dan perjuangan hak otonom bangsa Muslim. Di sisi lain langkah kebijakan pemerintah seperti darurat militer, pengesahan *Autonomous Region of Muslim Mindanao* (ARMM), sampai kebijakan “*All Out War*” sudah gagal meredam konflik dan justru melahirkan gerakan separatis baru seperti *Moro Islamic Liberation Front* (MILF).

Langkah penyelesaian koersif melahirkan bentuk kegagalan struktural dalam membangun kepercayaan dan sosuli menyelesaikan akar konflik (Yusuf et al., 2013). Bangsa Muslim menganggap bahwa langkah kasar pemerintah mencerminkan strategi untuk penghapusan eksistensi identitas Muslim, pada awalnya alih-alih menciptakan stabilitas keamanan nasional, langkah represif pemerintah pada kenyataanya memperdalam jurang antara pemerintah dan bangsa Muslim Filipina Selatan.

Kelompok Maute tentu termasuk salah satu dari anggota Muslim yang berpindah ke tanah Filipina, walaupun pada saat itu kelompok Maute belum terbentuk secara organisasi, dalam salah satu jurnal yang diteliti oleh Amira Jadoon, Nakissa Jahabani, dan Charmaine Willis pada tahun 2020 dengan judul “*The Emergence of the Islamic State in the Philippines*”. Menjelaskan bahwa Kelompok Maute merupakan bagian dari afiliasi krusial ISIS, khususnya dikarenakan keberadaanya sebagai kunci utama dalam strategi pengepungan Marawi pada tahun 2017.

Peristiwa Marawi adalah peristiwa yang terjadi terus-menerus selama lima bulan (Jadoon et al., 2020). kelompok Maute juga adalah afiliasi dari ASG (*Abu Sayyaf Group*) yang pada saat itu dipimpin oleh Isnilon Hapilon pada strategi pengepungan Marawi. Kelompok Maute dan ASG merupakan militan pertama yang berbai'at terhadap ISIS di Asia Tenggara mereka bekerja sama dalam upaya untuk menguasai daerah Marawi secara lantang, mengaplikasikan tatik dan strategi media mirip dengan operasi ISIS di Suriah dan Irak (Jadoon et al., 2020). Ini juga sejalan dengan penelitian Khoirul Amin (2018) aksi pengepungan selama lima bulan di Marawi adalah bukti eksplisit eksistensi ISIS di Asia Tenggara, dengan menjadikan Kelompok separatisme Maute sebagai lengan panjangnya (Amin, 2018).

Tidak berhenti sampai di situ ternya afiliasi kelompok Maute kepada ISIS menguntungkan bukan hanya dari strategi dan taktik saja namun juga menunjang pembiayaan operasinal, dana pembiayaan mengalirdari pusat ISIS dipelantari oleh Dr.Mahmud Ahmad, selaku mantan professor asal Malaysia, serta kegiatan illegal layaknya perdagangan narkoba (Jadoon et al., 2020) eskalasi ancaman Kelompok Maute juga memantik perhatian di ranah regional, posisi Filipina dianggap sebagai poros yang sangat strategis bagi ekspansi kekuatan ISIS, wacana ini jelas rentan terhadap infiltrasi ideologi transnasional, (Amin, 2018) khususnya terhadap negara Indonesia dan Malaysia jika dilihat dari kedekatan secara geografis.

Keberadaan Kelompok Maute di Filipina Selatan negara-negara tadi bisa saja terdampak ancaman penyebaran ideologi ISIS dengan begitu fenomena ini adalah kekhawatiran bersama.(Jones et al., 2018) Maka tidak jarang negara-negara tersebut melakukan kerjasama dalam mitigasi terorisme. Dengan begitu Keterlibatan Maute dengan jaringan ekstremis transnasional/ISIS tidak hanya berdampak nasional, namun juga mengancam regional yang memperkuat proses sekuritisasi di Filipina.

Pengepungan Marawi pada tahun 2017 menjadi titik krisis krusial dalam realita keamanan Filipina, yang memperlihatkan keberhasilan ISIS dalam memupuk ideologinya secara konkrit di kawasan Filipina Selatan. Peristiwa ini mengindikasikan ISIS mampu mengintegrasikan faksi-faksi separatis Muslim yang sebelumnya masing-masing, Kelompok Maute dan Abu Sayyad, kedalam satu garda aliansi bersenjata utuh kuat di

naungan ISIS (Amin, 2018). Persatuan ini tidak hanya aliansi strategis saja, namun bisa disebut hasil dari proses radikalisasi dan penyampaian ideologi yang terancang, di mana ISIS memberikan kontribusi dalam pelatihan militer, logistik, serta doktrin perlawanan yang berpegang teguh terhadap narasi jihad global. Dengan kejadian integrasi separatisme, Filipina bisa saja menjadi poros baru berbasis ISIS di Asia Tenggara setelah kemunduran ISIS di Timur Tengah.

Kelompok Maute dipersenjatai dan dilatih langsung dalam rangka menghadapi militer Filipina dalam konflik pusat kota yang aktif. Sepertimana di atas dalam penulis menjelaskan dalam jurnal yang diteliti oleh Amira Jadoon, Nakissa Jahabani, dan Charmaine Willis pada tahun 2020 dengan judul *“The Emergence of the Islamic State in the Philippines”*, ternyata kelompok Maute tidak hanya mengadopsi ideologinya saja namun juga pola-pola taktik strategi juga mereka aplikasikan dan ini diperjelas dengan penelitian yang diteliti oleh **Colonel Edwin Amadar** dan **Major Bobby Tuttle dalam jurnalnya yang berjudul “The Rise of ISIS in the Philippines and the Battle of Marawi”** jurnal ini menjelaskan bentuk yang lebih konkrit kelompok Maute dan ASG dalam menganut pola taktik ISIS seperti penggunaan ranjau, dan bom Improvisasi (IED), penyandraan warga sipil, pemanfaatan medan pusat kota sebagai basecamp perlawanan, sampai penyebarluasan propaganda melalui media sosial guna menarik simpatisan luar negeri untuk mendukung aksi tersebut (Amadar & Tuttle, 2019). peran media dalam mengkampanyekan posisi Kelompok Maute yang merupakan bagian dari ISIS sangat krusial. Pemberitaan media masa domestik maupun luar batas domestik yang memfokuskan penggunaan simbol identik dengan ISIS, perang kota, dan kampanye media sosial oleh Kelompok Maute, memperkuat framing bahwa eksistensinya sebagai ancaman transnasional, menurut Balzacq 2011 media adalah instrument berfungsi sebagai aktor pendukung dalam kampanye meyakinkan publik terhadap langkah negara mengambil tindakan luar biasa.

Peristiwa Marawi 2017 perang antara Kelompok Maute dan pemerintah Filipina. Tantangan Filipina dihadapkan dengan Kelompok Maute yang terafiliasi dengan ISIS menyoroti berubahnya konflik domestik menjadi salah satu dari jaringan kejahatan terorisme global. Pemerintah dibawah kendali kepemimpinan presiden Rodrigo Duterte,

merespons cenderung represif, termasuk deklarasi darurat militer dan peresmian Undang-Undang Anti-Terrorisme 2020. Langkah kebijakan ini memberi kesempatan diskusi penting perihal batasan keamanan nasional dan perlindungan hak-hak sipil, terutama dalam konteks negara demokratis (Ateneo et al., 2021). Karena hal ini berdampak signifikan terhadap keadaan kota dan keberlangsungan hidup sosial masyarakatnya.

Selama lima bulan aksi perang, ribuan gedung, rumah dan infrastruktur seperti masjid fasilitas umum hancur disebabkan serangan udara dan baku tembak, kota yang dulunya menjadi pusat budaya dan ekonomi masyarakat Muslim Filipina Selatan (Lestari, 2020) menimbulkan efek destruktif terhadap infrastruktur, bahkan tidak sedikit orang dipaksakan untuk mengungsi kurang lebih 350.000, dan banyak yang tinggal di penampungan sementara sampai saat ini. Konflik ini mengakibatkan banyak sekali korban entah dari pihak faksi-faksi ISIS maupun dari pihak pemerintahan Filipina termasuk warga sipil yang tidak tahu apa-apa,

Terlepas dari itu pengepungan Marawi bukan hanya operasi militer terbesar sejak era Marcos, tetapi lebih dari itu, peristiwa itu menyebabkan kehancuran total sistem pertahanan dan trauma berkepanjangan di kalangan penduduk sipil (Amadar & Tuttle, 2019). Akan tetapi, penting diperhatikan bahwa langkah sekuritisasi yang diambil oleh negara juga sangat riskan dimanfaatkan sebagai legitimasi kekuasaan. Pengambilan keputusan darurat militer dan Undang-Undang Anti Terorisme dipandang oleh lembaga HAM sebagai bentuk yang mengancam kebebasan hak-hak sipil. Dalam konteks ini langkah sekuritisasi ternyata sangat sempit jika dilihat dari sudut pandang demokrasi.

Dalam merespon Kelompok Maute, pemerintah Filipina mengkonstruksi wacana dengan memfokuskan kompleksitas ancaman yang mereka wakili, baik dari sisi ideologi maupun strategi. Pemerintah Filipina menegaskan bahwa Kelompok Maute bukan hanya kelompok bahaya yang besenjata, melainkan juga merupakan eksistensi dari ISIS sebagai kejahatan transnasional yang menyelundup ke kawasan-kawasan lokal. Dalam perkembangannya, upaya sekuritisasi terhadap Kelompok Maute tidak dapat dipisahkan dari meluasnya arus radikalisasi di kawasan Asia Tenggara setelah runtuhnya ISIS di Timur Tengah. Filipina merupakan salah satu wilayah yang paling terpengaruh,

khususnya di wilayah Mindanao yang telah lama menjadi episentrum perjuangan separatis dan kesenjangan sosial.

Dalam situasi ini, kelompok Maute memanfaatkan ruang sosial-politik yang rentan dan identitas keagamaan yang terpinggirkan untuk menciptakan aliansi ideologis dengan ISIS. Keterkaitan mereka dalam organisasi pro-ISIS di kawasan tersebut menunjukkan bahwa risiko yang mereka hadapi tidak hanya bersifat domestik, tetapi juga terkait dengan arus radikalisi transnasional, khususnya melalui penyebaran narasi-narasi jihad transnasional yang terbentuk dalam pengalaman lokal komunitas Muslim yang terpinggirkan (Selcuk & Panagiotou, 2020) Mereka membingkai Kelompok Maute sebagai agen dari kegiatan-kegiatan radikal internasional yang mencoba membawa konflik global ke ranah domestik Filipina (Ateneo et al., 2021). Dengan demikian Filipina menempatkan konflik Marawi bukanlah sekedar tantangan separatisme, melainkan merupakan bagian dari upaya memerangi terorisme global.

Fenomena melibatkan Kelompok Maute terhadap pengepungan Marawi memaksa posisi pemerintah untuk menggunakan instrument kekuasaan seperti deklarasi darurat militer, penguatan undang-undang anti-terorisme dan kerja sama terkait keamanan dengan negara-negara lain sebagai mitra. Hal ini bisa dikatakan sebagai bentuk represif pemerintah Filipina dalam perluasan peran militer dalam urusan sipil. Pemerintah juga menyampaikan bahwa eksistensi Kelompok Maute di antara masyarakat lokal bukan hanya timbul sebagai kekuatan ideologi ISIS saja. Namun juga merupakan kecakapan mereka perihal mengeksploitasi realitas kesenjangan sosial politik yang telah ada semenjak jaman spanyol menjajah Mindanao. (Ateneo et al., 2021). Ini menggambarkan narasi pemerintah juga termasuk langkah menanggulangi masalah-masalah sosial politik yang mendasari ketidakpuasan tersebut. Pemerintah memfokuskan pentingnya kebijakan pembangunan dan reformasi sosial sebagai bagian dari strategi jangka panjang guna meminimalisir potensi radikalisi. Perihal ini, program deradikalisasi, bantuan kemanusiaan, dan pembangunan dan pembangunan sarana pasca konflik menjadi faktor utama dalam respon pemerintah, dengan tujuan untuk menciptakan stabilitas keamanan nasional melalui pendekatan yang komprehensif, menggabungkan upaya militer dan langkah-langkah pemulihan yang lebih membangun.(Ateneo et al., 2021)

Respon represif dari pemerintah Filipina mengenai masalah yang menimpa Marawi 2017 memperlihatkan pandangan keamanan yang memprioritaskan pendekatan militeristik guna mengatasi tantangan terorisme transnasional. Rodrigo Duterte sebagai presiden Filipina pada saat itu mendeklarasikan darurat militer di sepanjang wilayah Mindanao pada tanggal 23 Mei 2017, bersamaan dengan terjadinya peristiwa pengepungan. Tindakan ini menggambarkan bagaimana negara mengaplikasikan daya tidak biasa guna menahan persebaran ideologi dan jaringan ISIS di Filipina Selatan (Ateneo et al., 2021) Pihak pemerintah Filipina menurunkan kekuatan militer secara masif, termasuk gempuran udara.

Dilihat dari sudut pandang keamanan masa kini, tantangan tentang negara bukan lagi sebatas agresi militer tradisional, akan tetapi, telah bervariasi menjadi bentuk-bentuk keamanan non-tradisional diantaranya seperti terorisme, ekstremisme, dan kejahatan lintas batas negara atau kerap disebut transnasionalisme. Barry Buzan selaku pakar keamanan menitik beratkan pada fenomena keamanan kontemporer bersifat multidimensional dan bisa saja meliputi isu sosial, politik, bahkan identitas. Pada kasus di Asia Tenggara, satu dari lain bentuk konkrit dari tantangan keamanan non-tradisional tersebut merupakan terorisme yang terafiliasi terhadap jaringan global seperti ISIS, dan separatis di Filipina Selatan adalah salah satu negara terduga secara terang-terangan mendukung ISIS dalam mewujudkan negara Islam (*Daulah Islamiah*) ini menjadikan negara Filipina sebagai titik komando baru ISIS di Asia Tenggara hal ini cukup riskan mengancam tatanan stabilitas nasional Filipina itu sendiri.

Perubahan kelompok separatis lokal bersumpah setia (*bai'at*) kepada ISIS berubah menjadi masalah krusial pasalnya ini melibatkan pengepungan di Marawi. Kelompok Maute, yang pada awalnya terkenal merupakan kelompok separatis lokal yang memperjuangkan hak keadilan bagi bangsa Muslim, namun secara bertahap berafiliasi dengan ISIS. Transformasi ini berlangsung sejalan dengan ketidakpuasan akan realita politik Filipina yang cenderung Kelompok Maute kebijakan perdamaian seolah stagnan, dengan begitu keputusan afiliasi dengan ISIS menjadi alasan untuk meningkatkan daya serta pendanaan guna merebut hak otonom Filipina Selatan Kembali ketangan Muslim, hal ini menjadikan Kelompok Maute sebagai representasi ISIS di Filipina Selatan.

(Hwang, 2018) Transformasi Kelompok Maute yang asalnya kelompok separatis lokal menjadi kelompok jihad transnasional yang tampil di layar kaca merupakan titik awal yang mengubah kesadaran negara terhadap ancaman tersebut, dan mendorong negara untuk melakukan pengamanan secara efektif.

Merespon fenomena tersebut, pemerintah Filipina meluncurkan kebijakan represif yang membingkai pada narasi keamanan. Melalui tindakan militer yang masif, deklarasi darurat militer, dan pernyataan resmi Anti-Terrorisme Act of 2020, pemerintah membingkai konflik ini menjadi eksistensial terhadap kedaulatan dan integritas nasional. Dalam rangka memahami respons pemerintah Filipina yang menempatkan Kelompok Maute sebagai ancaman eksistensial, pendekatan teori sekuritisasi menjadi penting untuk digunakan. Selanjutnya, pemikiran ini menggunakan pendekatan sekuritisasi yang dicetuskan oleh Thierry Balzacq, yang melihat sekuritisasi sebagai sebuah tatanan sosial yang dibangun dalam tatanan sosial, budaya, dan budaya yang berdampak pada kesadaran publik. Balzacq (2011) menegaskan bahwa keberhasilan sekuritisasi sangat bergantung pada kemampuan aktor negara dalam membentuk narasi yang selaras dengan nilai dan pengalaman masyarakat, serta pada dukungan media dan komponen visual yang memperkuat munculnya ancaman (Balzacq, 2011)

Pendekatan ini dinilai lebih relevan untuk menganalisis kasus Filipina Selatan, di mana narasi sekuritisasi terhadap Kelompok Maute dibentuk bukan hanya melalui pembicaraan formal, tetapi juga melalui visualisasi ancaman oleh media, penggunaan citra kebiadaban, dan legitimasi tindakan khusus seperti hukum militer dan penerapan Undang-Undang Antiterorisme atas nama keamanan nasional. Pendekatan ini bukan hanya membuat perbedaan dalam melihat bagaimana negara membentuk narasi keamanan, tetapi juga bagaimana narasi tersebut diperoleh dan ditafsirkan oleh masyarakat yang memiliki pengalaman dan identitas sosial tertentu. Oleh karena itu pendekatan Balzacq yang sosiologis dan relevan terhadap sekuritisasi sejalan dengan pendekatan konstruktivis, karena keduanya menekankan bahwa bahaya bukanlah substansi objektif, tetapi hasil konstruksi sosial melalui interaksi antara negara, masyarakat, dan simbol tertentu dalam konteks historis dan sosial yang spesifik.

Peristiwa pengepungan Marawi 2017 tidak hanya sebagai konflik militer semata, namun juga menggambarkan dilema diantara keamanan nasional dan penjagaan hak-hak sipil dalam negara demokratis. Pada saat negara membingkai suatu kelompok yang merupakan ancaman eksistensial dan menanggapinya melalui pendekatan ofensif dan represif, timbul pertanyaan kritis perihal batas kewenangan negara dalam menanggung keamanan tanpa mengorbankan kebebasan sipil, tindakan seperti *Anti-Terrorism Act of 2020* dan deklarasi darurat militer dalam kehidupan sipil, akan tetapi juga memicu kecemasan terhadap penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran HAM, dan meningkatkannya stigmatisasi terhadap komunitas Muslim khususnya Kelompok Maute, di Filipina Selatan (Taureck, 2006).

Peristiwa ini menggambarkan bahwa mekanisme sekuritisasi bukan sekedar perihal kebijakan keamanan, akan tetapi juga langkah politik wacana yang memutuskan siapa yang dinilai sebagai “ancaman” dan siapa yang dikorbankan dalam proses penciptaan stabilitas keamanan nasional (Rafiq, 2017). Dikarenakan itu, sangat diperlukan dalam menganalisis bagaimana negara membentuk narasi ancaman, serta bagaimana narasi membentuk respon negara, ruang sipil, dan dinamika sosial politik yang lebih besar cakupannya. Penelitian ini menjadi relevan untuk memahami bagaimana Filipina, yang posisinya sebagai negara demokratis dihadapkan dengan tekanan dari aktor non-negara transnasional, membingkai dan menangani konflik bersenjata berdasarkan kebijakan sekuritisasi.

Penelitian ini berupaya mengisi gap dalam penelitian sebelumnya yang sebagian besar menekankan dimensi ideologis dan aktivitas radikal Kelompok Maute. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus dan hipotesis sekuritisasi, penelitian ini akan menganalisis bagaimana pemerintah Filipina menggambarkan Kelompok Maute sebagai risiko keamanan nasional yang terkait dengan jaringan teroris global ISIS. Fokus penelitian ini tidak hanya pada bagaimana negara menciptakan sejarah risiko bagi kelompok separatis, tetapi juga pada dampak sekunder dari sejarah ini - khususnya pembentukan rasa malu terhadap karakter Muslim secara kolektif, meskipun sebagian besar komunitas Muslim adalah warga sipil yang tidak terlibat dalam perang bersenjata.

1.2 Pertanyaan Penelitian

John W. Creswell dalam bukunya yang berjudul “*Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*,” menjelaskan mengenai bentuk pertanyaan penelitian, Creswell mengatakan pertanyaan penelitian adalah aspek utama dalam penelitian dan ia menekankan dalam penelitian kualitatif pertanyaan penelitian harus memiliki beberapa karakter khusus diantaranya seperti “Bagaimana” dan “Mengapa” menurutnya hal ini lebih terbuka, eksploratif inilah yang dibutuhkan dalam penelitian kualitatif (Creswell, n.d.). Disini penulis akan menggunakan Teknik penulisan naratif deskriptif untuk menjelaskan fenomena

- 1. Bagaimana proses sekuritisasi pemerintah Filipina terhadap Kelompok Maute dibentuk oleh narasi ancaman transnasional?**
- 2. Bagaimana peran aktor negara, media, dan kebijakan luar biasa dalam membentuk ancaman tersebut?**
- 3. Bagaimana audiens domestik dan internasional merespons narasi ancaman yang dibangun pemerintah Filipina terhadap Kelompok Maute?**

1.3 Ruang Lingkup Batasan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus kualitatif berbasis pustaka dengan menitik beratkan fokus pada proses sekuritisasi Kelompok Maute oleh pemerintah Filipina selama pengepungan Marawi 2017. Secara pembahasasan topik, penelitian akan membahas *speech acts* (pidato dan dokumen resmi), praktik performatif (simbol dan kebijakan luar biasa seperti darurat militer), serta respons audiens (analisis opini media dan literatur akademik) dalam membangun narasi ancaman eksistensial. Secara geografis, kasus dibatasi pada wilayah provinsi Lanao del Sur khususnya kota Marawi pada periode Mei Oktober 2017. Secara metodologis, penelitian ini hanya memanfaatkan sumber sekunder (artikel jurnal akademik, buku, arsip media, dokumen resmi) tanpa pengumpulan data lapangan atau wawancara langsung . Dengan demikian, generalisasi

temuan terbatas pada konteks Marawi 2017 dan proses sekuritisasi ala Balzacq dalam kerangka sosiologis.

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Menganalisis bagaimana pemerintah Filipina membingkai Kelompok Maute sebagai ancaman eksistensial melalui proses sekuritisasi selama pengepungan Marawi 2017.
2. Mengidentifikasi bagaimana sejarah marginalisasi Muslim berkontribusi terhadap radikalisi dan keterlibatan Kelompok Maute dalam jaringan ISIS.
3. Menjelaskan praktik-praktik sekuritisasi yang digunakan, termasuk penggunaan media, simbol-simbol ideologis, dan kebijakan luar biasa seperti darurat militer dan Undang-Undang Anti-Terrorisme 2020.
4. Mengkaji dampak sosial politik dari sekuritisasi terhadap komunitas Muslim di Filipina Selatan pasca pengepungan Marawi.

1.4.2 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam konteks akademis penelitian ini diharapkan menjadi manifestasi dari penulis dalam upaya membangun keilmuan Studi Hubungan Internasional serta bisa menjadi referensi khalayak yang tertarik dalam bidang keamanan non tradisional dengan isu terorisme, fundamentalis, separatis, di Kawasan Filipina khususnya Filipina selatan.
2. Dalam segi pragmatis penelitian ini digunakan peneliti sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hubungan Internasional dan mendapatkan gelar sarjana.

3. Dalam konteks praktis sebagai harapan bisa menambah wawasan dan pendalaman penulis dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan meneliti suatu masalah.

1.5 Kerangka Teoritis-Konseptual

Studi sekuritisasi semakin berkembang di era kontemporer dari yang tadinya pendekatan *Copenhagen* (Buzan, Waever, & de Wilde 1998) dengan landasan pemikiran utamanya dititik beratkan pada *Speech act* menuju pendekatan sosiologis Thierry Balzacq (2011) dimana didasarkan pada aspek konteks dan praktik sosial.

Penelitian ini melihat Separatisme dan Terorisme sebagai dua faktor yang saling berkorelasi, Separatisme menurut Doyle (2010) merupakan sebuah proses sosial yang melibatkan advokasi pemisahan otonomi berdasarkan ras, pemerintah, budaya, etnis. Jika dalam konteks politik Separatisme dipandang sebagai gerakan kelompok-kelompok kecil tertentu yang menginginkan pemisahan politik karena kelompok dominan mengancam identitas dan kemampuan mereka untuk menentukan nasib sendiri (Widodo & Nugrahani, 2022).

Sedangkan menurut Schmid (2023) Terorisme merupakan upaya kekerasan yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan untuk menebar rasa takut yang mendalam. Kegiatan ini biasanya dilakukan secara individu, kelompok, baik aktor negara secara sembunyi-sembunyi, dengan motif yang bisa saja politik, kejahatan kriminal, maupun personal (Schmidt, 2023). Dalam penelitian ini untuk menganalisis pola teror dan separatisme Kelompok Maute dibingkai sebagai ancaman eksistensial, penulis menggunakan teori sekuritisasi sosiologis dari Thierry Balzacq (2011).

Penelitian ini menjadikan teori sekuritisasi Thierry Balzacq (2011) sebagai premis utama dalam menganalisis pendekatan keamanan pemerintah Filipina terhadap Kelompok Maute. Berbeda dengan pendekatan Copenhagen School yang dicetuskan Ole Waever, Barry Buzan dkk. yang lebih menekankan pada peran tindakan wacana (Speech act).

Komparasi Sekuritisasi *Copenhagen School* vs Thierry Balzacq

Aspek	<i>Copenhagen School</i> (1998)	Thierry Balzacq (2011)	Implikasi kasus di Filipina
Definisi Sekuritisasi	Suatu proses speech act yang membangun isu sebagai “ancaman eksistensial” (Buzzan et al., 1998)	Suatu proses yang melibatkan aktor audiens, dan konteks dalam mengkonstruksi “ancaman eksistensial” (Balzacq, 2011).	Pemerintah Filipina tidak hanya menggunakan pidato, tetapi juga kebijakan (darurat militer) dan simbol (visual ISIS).
Fokus Utama Analisis	Tindakan tutur kata atau linguistik (<i>securitizing move</i>).	Praktik sosial, kebijakan, dan relasi kekuasaan.	Membingkai Kelompok Maute sebagai ancaman eksistensial berpijak pada media, kebijakan, dan sejarah konflik.
Peran Aktor	Aktor negara sebagai “ <i>securitizing actor</i> ”.	Aktor mempunyai modal simbolik (otoritas, sumber daya) untuk mempengaruhi audiens (Balzacq, 2011)	Presiden Duterte menggunakan hak prerogative politik dan militer untuk melegitimasi tindakan represif.
Peran Audiens	Audiens pasif (hanya perlu menerima narasi dari pemerintah)	Audiens berperan penting dalam menegosiasikan menolak tidaknya narasi (Balzacq, 2011).	Komunitas Muslim Mindanao menolak stigmatisasi, sementara non-Muslim mendukungnya.

konteks	Tidak mempunyai peran (diabaikan)	Peran konteks sangat krusial dalam menentukan proses sekuritisasi (sekuritisasi berhasil jika resonan dengan konteks lokal (Balzacq, 2011)	Dengan adanya peristiwa historis marginalisasi komunitas Muslim Mindanao memudahkan pemingkaian ancaman.
Materialitas	Abstrak (wacana sebagai inti).	Mempertimbangkan langkah konkret (UU operasi militer)	UU Anti-Terrorism Act 2020 dan operasi militer di Marawi sebagai instrument sekuritisasi.
Kritik Utama	Mengabaikan kekuatan non-diskursif (kebijakan, kekerasan simbolik)	Terlalu luas dan kompleks (Taureck, 2006)	Pendekatan sekuritisasi Balzacq lebih cocok untuk menganalisis kasus kompleks di Filipina
Contoh Aplikasi	Pidato presiden Duterte menyebut Kelompok Maute sebagai “ISIS Filipina”.	Kesinambungan antara pidato, kebijakan darurat militer, dan pemberitaan media (Ateneo et al., 2021)	Analisis mencakup Pidato, kebijakan dan respon adiens (respon masyarakat).

Tabel 1 Komparasi Sekuritisasi Copenhagen School vs Thierry Balzacq

Balzacq mengembangkan pendekatan sosiologis terhadap sekuritisasi yang lebih memperhatikan konteks lingkungan sosial, politik, dan budaya, dimana tempat persiapan sekuritisasi berlangsung (Balzacq, 2011).

Dalam kerangka teori sekuritisasi Balzacq (2011) membagi tiga fokus utama dalam proses sekuritisasi, diantaranya *Political Agency* (Agen Politik), *Audience*

(Audience), dan *Context* (Konteks sosial dan Politik) ketiganya adalah instrumen krusial yang saling terikat dan menunjang keberhasilan tidaknya sebuah proses sekuritisasi (Balzacq, 2011).

1.5.1 *Political Agency* (Agen Politik)

Dalam aspek agen politik Balzacq (2011) menjelaskan hal ini mengacu pada aktor yang melakukan sekuritisasi, singkatnya mereka yang membingkai suatu isu kedalam dimensi keamanan. Dengan demikian agen politik tidak hanya menyampaikan narasi keamanan (*speech act*) namun, juga melakukan langkah yang memperkuat klaim ancaman tersebut dengan cara kebijakan, simbol, dan tindakan nyata (Balzacq, 2011). Balzacq (2011) menegaskan krusialnya modal simbolik (*symbolic capital*) dan otoritas institusional yang dimiliki aktor demi dapat mengarahkan opini publik dan membingkai persepsi ancaman eksistensial (Balzacq, 2011).

Dalam konteks penelitian ini, Presiden Rodrigo Duterte, Panglima Angkatan Bersenjata Filipina (AFP) dan parlemen Filipina merupakan bagian dari agen-agen sekuritisasi utama yang membingkai Kelompok Maute sebagai ancaman eksistensial nasional melalui pidato publik, deklarasi darurat militer, dan pengesahan Undang-Undang Anti-Terrorisme. Dengan demikian penulis akan menggunakan konsep *political agency* untuk menganalisis sejauh mana aktor negara seperti Presiden Rodrigo Duterte, Panglima Angkatan Bersenjata Filipina (AFP). Dan Parlemen yang membentuk narasi ancaman kepada Kelompok Maute.

Melalui aspek *Political Agency* data yang akan dianalisis meliputi Pidato politik, pernyataan media resmi, deklarasi darurat militer, dan dokumen kebijakan seperti Undang-Undang Anti-Terrorisme 2020. Dengan begitu aspek ini, penulis akan menganalisis bagaimana negara membingkai Kelompok Maute sebagai representasi ancaman transnasional melalui afiliasinya dengan ISIS.

1.5.2 *Audience* (Audien)

Kerangka teori sekuritisasi menurut Balzacq (2011) juga menegaskan bahwa sekuritisasi tidak hanya soal menyampaikan narasi wacana, namun, juga tentang membujuk audiens agar yakin. Balzacq (2011) menegaskan bahwa audiens adalah tolakukur berhasil tidaknya sebuah klaim ancaman, audiens disini adalah mereka yang relevan misal diantaranya, masyarakat sipil, lembaga internasional, media, maupun pemangku kebijakan lainnya. Audiens memiliki penting dalam menerima tidaknya ancaman atau menegosiasikan kontruksi ancaman tersebut.

Dalam konteks penelitian ini, mereka yang dilabeli sebagai Audiens adalah publik non-Muslim Filipina, media nasional maupun internasional, dan mitra keamanan eksternal seperti Amerika Serikat dan ASEAN. Kebijakan luar biasa seperti darurat militer dan operasi militer besar-besaran di Marawi dilegitimasi oleh respons audiens yang positif mendukung terhadap framing ancaman yang dilakukan oleh aktor negara. Aspek Audien akan penulis gunakan untuk menganalisis sejauh mana narasi sekuritisasi ini diterima dan dilegitimasi oleh peran audiens sebagai kuncinya. Dalam konteks penelitian ini penulis membagi Audiens menjadi tiga diantaranya adalah masyarakat sipil non-Muslim, media nasional, dan media internasional, untuk data yang akan dianalisis berupa berita media, serta laporan resmi pemerintah.

1.5.3 Context (Konteks Sosial Politik)

Aspek konteks ditujukan terhadap situasi sosial, politik, dan historis yang berpotensi menjadikan diskusif tentang keamanan berkembang dan diterima. Dalam kerangka pemikiran Balzacq (2011) berpendapat bahwa sekuritisasi hanya dapat berhasil dengan konteks keadaan sosial yang mendukung klaim ancaman (Balzacq, 2011). Dalam kasus penelitian ini, konteks sekuritisasi terdiri dari sosio historis marginalisasi bangsa Muslim di Mindanao, kegagalan perjanjian damai antara pemerintah Filipina dan kelompok separatis sebelumnya (MNLF dan MILF), dan lahirnya faksi separatis baru yaitu kelompok Maute, yang memantik semangat separatis lokal dengan semangat jihad transnasional melalui keterlibatannya dengan ISIS. Peristiwa pengepungan Marawi pada tahun 2017 menjadi bentuk konkrit peristiwa krisis yang memperkuat status darurat untuk sekuritisasi yang sah dan diterima publik.

Dalam aspek konteks (*contexs*) penulis akan memahami situasi kondisisi, sosial, politik, dan historis yang mengkonstruk penerimaan pada narasi tersebut. Dengan demikian penulis akan menggunakan data mencakup sejarah marginalisasi komunitas Muslim di Mindanao, kegagalan perjanjian perdamaian, serta, diskursus identitas dan eksklusi sosial yang menjadi latarbelakang kemunculan Kelompok Maute (Balzacq, 2011). Ini sesuai sebagaimana Balzacq (2011) katakan bahwa sekuritisasi hanya akan berhasil jika klaim ancaman memiliki resonansi dengan sosial kolektif.

Untuk menganalisis pidato resmi, kebijakan pemerintah, narasi media, dan konteks sosial historis melalui teknik analisis wacana kritis dan studi kasus, tiga aspek teori sekuritisasi Balzacq di atas akan digunakan sebagai kerangka.

1.6 Asumsi Penelitian

Dalam pendekatan kualitatif, analisis ini tidak menggunakan hipotesis dalam bentuk pernyataan yang akan dibuktikan secara numerik, tetapi membangun penelitian tentang serangkaian asumsi hipotetis yang filosofis dan esensial. Sejalan dengan Creswell (2014), asumsi adalah keyakinan mendasar yang menurutnya benar adanya meskipun tidak dapat dibuktikan secara empiris secara langsung. Dengan begitu asumsi ini konstruksi pandangan dunia penelitian, termasuk bagaimana penulis memaknai realitas dan hubungan antara informasi dan pengalaman (Balzacq, 2011; Wendt, 1992).

Pertimbangan ini didasarkan pada asumsi dari pendekatan teori sekuritisasi sosiologis yang dikembangkan oleh Thierry Balzacq. Asumsi yang paling kuat adalah bahwa ancaman keamanan tidak objektif dan universal, tetapi, merupakan hasil dari konstruksi sosial yang dibentuk melalui praktik simbolik, narasi diskursif, interaksi antara aktor yang melakukan sekuritisasi dan audiens (Balzacq, 2011; Wendt, 1992) Dengan demikian, penanganan sekuritisasi terhadap Kelompok Maute bukan hanya merupakan reaksi terhadap keradikalan semata, tetapi juga merupakan bagian dari prosedur politik yang digunakan oleh pemerintah Filipina untuk mendefinisikan kelompok tersebut sebagai bagian dari organisasi ancaman global/ISIS. Oleh karena itu, asumsi mendasar dari penelitian ini adalah bahwa:

- 1. Melalui praktik diskursif dan kebijakan luar biasa, aktor negara memiliki kemampuan simbolik dan institusional untuk mengubah persepsi masyarakat terhadap kelompok separatis menjadi ancaman terorisme transnasional.**
- 2. Fakta bahwa Muslim Filipina dimarginalisasi secara historis serta sejarah konflik bersenjata di Mindanao memungkinkan pernyataan sekuritisasi yang mengaitkan kelompok Maute dengan ISIS diterima secara luas dan dibenarkan secara politik.**
- 3. Respon audiens (media domestik, dan internasional) sangat penting untuk menentukan keberhasilan upaya sekuritisasi.**
- 4. Sekuritisasi berfungsi sebagai alat untuk legitimasi tindakan luar biasa, seperti deklarasi darurat militer dan pengesahan Undang-Undang Anti-Terrorisme, yang menyebabkan negara memperluas otoritasnya di ruang sipil.**

1.7 Kerangka Analisis



